

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban atas pokok permasalahan yang telah di deskripsikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan SIK BLU untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban bendahara pada BLU UNG yang dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Meskipun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan pada tahap monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana secara maksimal. Terdapat penyampaian LPJ oleh Bendahara Fakultas/Unit Kerja yang mengalami keterlambatan dan masih terdapat ketidaksesuaian dan kekeliruan data LPJ yang telah disampaikan.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan SIK BLU untuk meningkatkan laporan pertanggungjawaban keuangan pada BLU UNG yaitu sebagai berikut:
  - a. Komunikasi (*Communication*); komunikasi yang dibangun belum secara maksimal dilaksanakan, terutama pada pelaksanaan rapat pembahasan terkait LPJ Keuangan Fakultas/Unit Kerja atas kewajiban jangka pendek termasuk pembayaran remunerasi; dan terdapat pelaksanaan sosialisasi atas

aturan, kebijakan, atau *up date* terbaru masih sangat minim pelaksanaanya kepada bendahara Fakultas/Unit Kerja. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kualitas LPJ Bendahara Fakultas/Unit Kerja pada pelaksanaan implementasi kebijakan SIK BLU untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan pada BLU UNG.

- b. Sumber Daya (*Resources*); meskipun secara keseluruhan dalam penyediaan sumber daya fasilitas pendukung telah terpenuhi yaitu sistem informasi informasi manajemen terintegrasi dalam sistem komputerisasi yang memeroses dan mengintegrasikan seluruh alur pengelolaan keuangan SIK BLU dalam bentuk jaringan koordinasi, penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan efisien. Namun lain halnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang ada pada BLU UNG belum berjalan dengan maksimal terutama pada penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi jabatan atau kualifikasi pendidikan. Sehingga masih perlunya dilakukan pelatihan dasar dan pengetahuan umum di bidang pengelolaan keuangan.
- c. Sikap Pelaksana atau Disposisi (*Attitudes or Dispositions*); hasil penelitian menemukan bahwa sikap pelaksana belum sepenuhnya komitmen dan konsisten dalam melaksanakan ketentuan penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga berimplikasi pada keterlambatan penyampaian LPJ BLU UNG ke kantor KPPN paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya dan saat pengajuan pengesahan sebagai data pembanding bagi KPPN. Sikap pelaksana yang belum mencerminkan kecepatan berfikir dan bertindak inisiatif untuk merespon dan mendukung ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan bendahara dalam SIK BLU dan belum *responsiveness* dalam penghitungan dan pembukuan terkait LPJ secara cepat, tepat dan akurat.

- d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic*); struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIK BLU tersedianya beberapa ketentuan dan peraturan yang telah diatur dan juga tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pelaksanaan SIK BLU yang memberikan keseragaman dalam tindakan para implementor, sehingga menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik, serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan. Namun struktur birokrasi belum didukung sosialisasi SOP di unit kerja secara maksimal.

## 5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi, dalam tahap komunikasi atas pelaksanaan rapat yang dilakukan seharusnya membahas juga lebih terperinci terkait LPJ Keuangan atas kewajiban jangka pendek termasuk pembayaran remunerasi serta pelaksanaan rapat tersebut telah masuk dalam program bulanan tingkat pimpinan baik Pimpinan Universitas dan Fakultas/Unit Kerja.
2. Pejabat/Pengelola Keuangan, Tim SAI, Tim Verifikator, Bendahara dan manajemennya sebaiknya menyediakan mediasi secara online yang memiliki banyak fitur dan manfaat sehingga komunikasi yang dibangun berjalan lebih lancar dan baik.
3. Disediakannya SOP/Panduan terkait anggaran yang mengatur khusus untuk pembayaran remunerasi dengan ketentuan pada pagu anggaran tersebut tidak boleh dilakukan pergeseran atau pengurangan pagu, dan hanya bisa dilakukan penambahan pagu.
4. Disediakannya SOP/Panduan terkait Rencana Penarikan Dana bulanan dari Fakultas/Unit Kerja, sehingga dapat dengan mudah dilakukan analisis kebutuhan pembiayaan terutama kebutuhan anggaran pembayaran remunerasi.
5. Disediakannya SOP/Panduan terkait penyimpanan dana kas khusus untuk pembayaran remunerasi ke rekening bank BRI, sehingga dana kas pembayaran remunerasi selalu tersedia.

6. Seluruh unsur pengelola keuangan diharapkan lebih meningkatkan komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SIK BLU, terutama dalam hal akuntabilitas dan penyampaian LPJ bendahara.
7. Satuan Pengawasan Internal diharapkan lebih diprioritaskan dalam melaksanakan pengawasan, reviu, monitoring dan evaluasi terhadap sikap pelaksana yang belum mencerminkan kecepatan berfikir dan bertindak inisiatif untuk merespon dan mendukung ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan bendahara dalam SIK BLU dan belum *responsiveness* dalam penghitungan dan pembukuan terkait LPJ secara cepat, tepat dan akurat secara intensif dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amerieska, Siti. 2016. Pengaruh *Human, Organization dan Technology* (Hot Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan pada Badan Layanan Umum. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Manajemen*. Vol. 23(2), 122-144. (<http://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jabm/article/view/78>, Diakses 21 November 2020)
- Amrizal, Dedi. 2019. *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Barlian, Eri. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Dauwango, Supriyadi & Olii, Salahudin. 2019. Tingkat Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi pada *Domain Evaluate, Direct, and Monitoring*. *Jambura Journal of Informatics*. Vol. 1(1), 20-26. (<https://doi.org/10.37905/jji.v1i1.2331>, diakses tanggal 26 November 2020)
- Fahturnurahman, M. 2016. Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Tarbawi*. Vol. 2(2), 14-27. (<https://www.neliti.com/publications/256485/faktor-birokrasi-dalam-keberhasilan-implementasi-kebijakan-publik>)
- Halik, Abdul. 2015. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri (*Policy Implementation of Government Affairs Devolution Scope of the Ministry of Home Affairs*). *Jurnal Bina Praja*. Vol. 7(2), 131-148. (<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148>)
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hardiyansyah. 2017. Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik dalam Perspektif Riset Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media.

- Idrus, Ainun Fauziah Isnani. Ilato, Rosman. & Mozin, Sri Yulianty. 2020. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sentral Kota Gorontalo. *Jambura Journal of Administration and Public Service*. Vol. 1(1), 1-10. (<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jipa/article/view/7313>)
- Igirisa, Irawaty., dkk. 2020. Implementation of Development Policy for Livestock Farming Business in Gorontalo Regency, Gorontalo, Indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy*. Vol. 11(12), 138-142. (<https://www.sysrevpharm.org/index.php?mno=28462>, diakses tanggal 12 Desember 2020)
- Irwandi. 2019. Analisis Implementasi Sistem Informasi Keuangan, Kompetensi Pegawai dan Evaluasi Manajemen Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan pada Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Seluruh Indonesia. *Jurnal Manajemen*. Vol. 10(1), 35-43. (<http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v10i1.1893>)
- Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada Darmasraya.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Faktas Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (<https://kbbi.web.id/administrasi>)
- Kamus Oxford. *The Oxford Advanced Learner's Dictionary*. (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/manage?q=manage>) dan (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/management?q=management>)
- Lahay, dkk. 2020. Evaluasi Praktek Penyalasan Strategi Bisnis dan Strategi Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi. *Jambura Journal of Informatics*. Vol. 2(1), 42-49. (<https://doi.org/10.37905/jji.v2i1.4644>)
- Maryati. 2014. *Meningkatkan Keunggulan Perusahaan Melalui Manajemen Perkantoran Efektif*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mindarti, Lely Indah. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik (Menuju Tata Kelola Yang Baik)*. Malang: UB Press.
- Mozin, Sri Yulianty & Popoi, Irina. 2018. *Implementation of Total Quality Management (TQM) in Efforts to Improve the Quality of Higher Education (Case Study at Gorontalo State University)*. *Journal of International*

*Conference Proceedings (JICP).* Vol. 1(2), 1-10.  
(<https://doi.org/10.32535/jicp.v1i2.308>, diakses 04 Desember 2020)

Muadi, Sholih. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik.* Vol. 6(2), 195-224.  
(<http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078>, diakses 17 Desember 2020)

Osborne, David dan Gaebler, Ted. 2003. *Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi): Sepuluh Prinsip untuk Mewujudkan Pemerintahan Wirausaha.* Jakarta: PPM.

Patarai, Muhammad Idris. 2020. *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan.* Makassar: De La Macca.

Permatasari, Iman Amanda. 2020. Book Review: Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government.* Vol. 1(1), 034-038.  
(<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>)

Rafiq, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I Tahun 2018 (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).* (<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32664>, diakses 22 Oktober 2020).

Rahmadana, Muhammad Fitri, dkk. 2020. *Pelayanan Publik.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi.* Makassar: CV Sah Media.

Ramdhani, Abdullah dan Ramdhani, Muhammad Ali. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik.* Vol. 11(1), 1-12.  
(<http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>)

Rees, W. David & Porter, Christine. 2015. *Skills of Management & Leadership Managing People in Organizations.* London: Palgrave.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.*

Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-47/PB/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.*

Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).*

Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 152170/A.A2/KU/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Gorontalo.*

Revida, Erika., dkk. 2020. *Teori Administrasi Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Ristiani, Ida Yunari. 2020. Manajemen Pelayanan Publik pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Competition: Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 11(2), 165-178. (<https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.116>, diakses 03 Desember 2020)

Santosa, Pandji. 2017. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

- Sellang, Kamaruddin. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya*. Surabaya: Qiara Media.
- Siagian, Sondang P. 2019. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sitohang, Rayambong Sumuang dan Kariono. 2015. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*. Vol. 5(2), 173-196. (<https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.72>, diakses 22 Oktober 2020)
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suparno. 2017. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, M. Chazienul. 2018. *Public Service Tinjauan Teoritis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Malang: UB Press.
- Universitas Negeri Gorontalo. *Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 005/UN47/KU/2021 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Goronalo*.
- Universitas Negeri Gorontalo. *Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1338/UN47/KU/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Negeri Gorontalo Tahun Anggaran 2021*.
- Universitas Negeri Gorontalo. *Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 06/UN47/KU/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Negeri Gorontalo Tahun Anggaran 2021*.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.